

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN MAGELANG

Enita Binawati¹, Nurul Badriyah²

¹²Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia
Email: enitabinawati@gmail.com, nurulbadriyah438@gmail.com

Abstract

This study aims to determine moderating effect of local finance supervision, local finance management accountability and local finance manajemen transparency on local government performance on Magelang Regency. The population in this study chairman, secretary the accounting/financial administration departemen staff (SKPD) in Magelang Regency, such as 31 Regional Work Unit with criteria have a minimum term of one year. This study used 98 people as respondents. The data were collected by using questionnaires. The analytical method used in this research is descriptive quantitative analysis method. The data analysis was done by using multiple linear regression tests with testing t at a significance level of 5%. The results showed that, simultaneously at variabel the local finance supervision, accountability and transparency in the finance management have a significant effect on the Local Government of Magelang Regency performance. From the result simultaneous test (F Test). Partially showed the results of the supervision of the local fiancé has a significant effect on the Local Government of Magelang Regency performance. Accountability in the finance management and transparency in the finance management not has a significant effect on the Local Government of Magelang Regency performance. As evidenced from the result partial test (t Test).

Keywords : *Supervision, Accountability, Transparency, Performance.*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan informasi yang memadai tentang pengelolaan asset dan sumber daya keuangan yang menunjang transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip akuntansi. Pada masa sekarang ini kinerja pemerintah menjadi sorotan publik, hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Audityo et al.,2013). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah di tuntutan untuk melaksanakan kinerja dengan baik sebagai perwujudan konsep otonomi daerah yang transparan dan akuntabel, tentunya itu semua tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah akan berperan dalam pemeriksaan dan mengawasi aliran keuangan di instansi Negara. Masyarakat yang akan melihat sekaligus menilai kinerja pemerintah, dari situ kinerja pemerintah dapat di ukur. Tentunya itu semua berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ketidaktauan masyarakat maka tak jarang masyarakat akan mengeklaim bahwa pemerintah belum bekerja secara baik, dan tak jarang masyarakat dengan mudahnya akan mengeklaim bahwa pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal tersebut yang seharusnya tidak boleh terjadi di masyarakat. Pemerintah sektor publik adalah pemerintah yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat, keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat di sini sudah jelas. Tak jarang masyarakat mengerti akan hal ini, khususnya di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah, ibu kota Kabupaten Magelang ini adalah Kota Mungkid. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang di utara. Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di timur, daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di barat serta kota Magelang yang berada di tengah-tengahnya.

Para pejabat di Kabupaten Magelang telah menorehkan prestasi dalam hal administrasi keuangan, ini dibuktikan dengan di perolehnya penghargaan tiga tahun berturut-turut kepada pemerintah Kabupaten Magelang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan daerah th 2018, hal ini menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Magelang. Tentunya hal ini tidak lepas dari kinerja seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Magelang. Sinergi dan kinerja mereka yang patut kita jadikan contoh. Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis, disini penulis berinisiatif untuk meneliti bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akurat pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012) Akuntabilitas finansial atau keuangan

adalah pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya dan Sudana (2015). transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menguji secara empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Iqbal, (2013:37), pengertian pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan. Sedangkan menurut Sumarsono, (2010) : pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja agar sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.

Pengawasan ini tidak untuk mencari kesalahan semata namun agar setiap kegiatan unit kerja berjalan sesuai dengan peraturan organisasi, tujuan organisasi dan visi misi organisasi, dan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali suatu saat nanti. Pengawasan juga menjadi bahan evaluasi setiap unit kerja. Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Fungsi Pengawasan Keuangan

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002:8). Menurut Adisasmita (2011:89): Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan organisasi, individu, atau kelompok.

Tujuan Akuntabilitas menurut Mahmudi (2010:23) bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah suatu tindakan untuk memberikan informasi, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Disini bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan semata namun diharapkan dengan kesalahan tersebut dapat memperbaiki dan harus segera di koreksi. Dengan begitu diharapkan pelaksanaan suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP RI No. 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. Menurut Halim, (2007:330) adalah Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Tanjung (2011) transparansi adalah Bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin yang mendasar dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2001:329) mendefinisikan kinerja sebagai berikut Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan menurut Moehariono (2019:95) pengertian kinerja adalah Sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan.

Hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pengawasan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini di sebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Menurut Menzeis dalam Rahayu (2008), Zubir, Amri dan Saiful (2012) : Kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk

mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab timbulnya. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna et al, (2015) yang menunjukkan bahwa Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan asumsi diatas maka hipotesis yang di bangun dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hubungan antara Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah.

Asas Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas yang baik akan meningkatkan tingkat kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Penelitian Halim (2002) dan Rahmanurrasjid (2008) memberikan hasil yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Rahmanurrasjid (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Lebih lanjut Halim (2002) menyatakan akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan penjelasan asumsi di atas maka hipotesis yang di bangun dalam penelitian ini adalah :

H2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

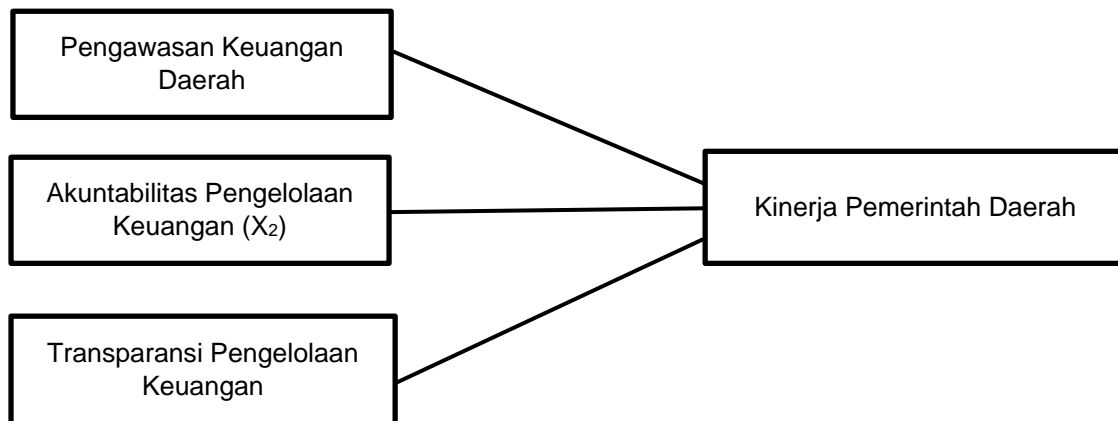
Hubungan antara Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Penerapan asas transparansi penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menurut Auditya et al, 2013, Wiguna et al, (2015) dan adiwirya dan Sudana (2015) menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan keuangan

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Maka hipotesis yang dibangun berdasarkan penjelasan di atas adalah :

H3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Gambar Model Penelitian



METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun metode yang dipilih dan akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survei. Metode survei merupakan suatu metode yang cara pengumpulan data-datanya diperoleh dari sekumpulan objek-objek yang berkepentingan yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2010). Dalam survei, informasi diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang datanya dikumpulkan dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 31 SKPD dengan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi, Pejabat pengelola keuangan, dan Sekretaris dari setiap SKPD. Dan minimal pegawai yang sudah menjabat satu tahun di SKPD Kabupaten Magelang. Para responden ini dipilih karena mereka merupakan pihak yang mempunyai peran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut putra (2003) data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditunjukkan kepada responden Bagian Keuangan di seluruh SKPD Kabupaten Magelang. Kuisisioner dalam penelitian ini akan didesain sedemikian rupa, yang kemudian akan diisi oleh pegawai yang bekerja di SKPD Kabupaten Magelang. Peneliti tidak mengembangkan sendiri model pertanyaan dalam kuisisioner melainkan menggunakan model pertanyaan yang telah ada dan digunakan pada penelitian terdahulu. Kuisisioner yang digunakan akan mengukur satu variabel

dependen dan tiga variabel independen sesuai model penelitian yang telah ditetapkan. Skala yang digunakan untuk pengukuran adalah skala likert yang dinyatakan dengan interval angka 1 sampai dengan angka 5. Skala likert dipilih oleh peneliti karena skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, antara lain :

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah sebuah variabel yang nilainya akan dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel independen (Sugiarto, 2017: 78). Variabel dependen disebut juga variabel terikat atau yang dipengaruhi. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu Kinerja pemerintah daerah (Y).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen (terikat) (Sugiarto, 2017: 78). Variabel ini disebut juga variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (X_1), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X_2), dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3).

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *kuesioner* (angket). Dengan cara mendatangi langsung ke kantor SKPD Kabupaten Magelang dan memberikan kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditunjukkan kepada responden, yaitu bagian keuangan di SKPD Kabupaten Magelang. Tahap berikutnya responden memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya. Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah dengan analisis data kuantitatif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pengolahan data menggunakan SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji t.

Definisi Oprasional Variabel

Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah akan diukur dengan menggunakan 5 (Lima) item pertanyaan yang diharapkan dapat menggambarkan dan mewakili kinerja Pemerintah SKPD Kabupaten Magelang. Responden diminta untuk menjawab tentang presepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Instrumen pertanyaan diadopsi dari fifit purnama (2016), masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian di ukur dengan skala liker 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja pemerintah daerah yang paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja pemerintah daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) perumusan tujuan, visi dan misi, (2) perumusan

indikator kinerja, (3) pengukuran kinerja, (4) evaluasi program kerja, (5) pengukuran kinerja SKPD.

Pengawasan Keuangan Daerah (X1)

Variabel Pengawasan Keuangan Daerah akan di ukur melalui tujuh (7) kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Magelang. Responden di minta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Instrument pertanyaan di adopsi dari purnama (2016), masing-masing item tersebut kemudian diukur menggunakan *Skala Likert 5* poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti pengawasan keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya, poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pengawasan keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) sistem yang diterapkan SKPD, (2) evaluasi tindakan penyimpangan akan diperbaiki oleh SKPD.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui delapan kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Instrument pertanyaan diadopsi dari Purnama (2016), masing-masing item tersebut kemudian diukur dengan menggunakan *Skala Linker 5* poin, dimana poin satu diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) pemenuhan nilai etika dan standar dalam pengambilan keputusan, (2) kelengkapan bukti-bukti transaksi, (3) sasaran program, (4) prioritas SKPD, (5) transparansi, (6) adanya sistem informasi, (7) ketersediaan sarana.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Variabel Transparansi Pengeolaan Keuangan Daerah akan diukur melalui enam pertanyaan. Yang diharapkan menjadi ukuran penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Responden diminta untuk menjawab tentang persepsi mereka, memilih lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Instrument pertanyaan diadopsi dari Purnama (2016), masing-masing item tersebut kemudian diukur dengan menggunakan *Skala Linker 5* poin, dimana poin satu diberikan untuk jawaban yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk variabel ini : (1) informasi prosedur, (2) pengelolaan keuangan, (3) transparansi informasi keuangan, (4) kerjasama.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 123 kuesioner. Dari jumlah kuesioner tersebut, terdapat 25 kuesioner tidak kembali dikarenakan melampaui batas waktu yang

ditentukan peneliti, sehingga kuesioner yang kembali dan dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 98 responden.

Uji Validitas

Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan uji signifikansi koefisiensi dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Dengan jumlah kuesioner sebanyak 98 responden maka dapat diketahui bahwa r-tabel sebesar 0.

Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kinerja Pemerintah Daerah	Y1	0,616	0,202	Valid
	Y2	0,642	0,202	Valid
	Y3	0,641	0,202	Valid
	Y4	0,461	0,202	Valid
	Y5	0,518	0,202	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0,596	0,202	Valid
	X1.2	0,685	0,202	Valid
	X1.3	0,717	0,202	Valid
	X1.4	0,555	0,202	Valid
	X1.5	0,694	0,202	Valid
	X1.6	0,672	0,202	Valid
	X1.7	0,711	0,202	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	X2.1	0,687	0,202	Valid
	X2.2	0,609	0,202	Valid
	X2.3	0,61	0,202	Valid
	X2.4	0,511	0,202	Valid
	X2.5	0,423	0,202	Valid
	X2.6	0,763	0,202	Valid
	X2.7	0,737	0,202	Valid
	X2.8	0,522	0,202	Valid
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	X3.1	0,62	0,202	Valid
	X3.2	0,735	0,202	Valid
	X3.3	0,822	0,202	Valid
	X3.4	0,77	0,202	Valid
	X3.5	0,57	0,202	Valid
	X3.6	0,692	0,202	Valid

Dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner mengenai kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel yang sebesar 0,202. Oleh karena itu, pernyataan dalam kuesioner mengenai kinerja pemerintah daerah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam kuesioner dapat dikatakan valid dan dapat dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya.

Uji Realibilitas

Pada penelitian ini pengujian realibilitas diukur menggunakan *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* (α) $\geq 0,6$, maka instrument yang terdapat pada kuesioner penelitian dinyatakan andal atau reliable.

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,501	0,6	<i>Reliable</i>
Pengawasan Keuangan Daerah (X1)	0,784	0,6	<i>Reliable</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,724	0,6	<i>Reliable</i>
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	0,794	0,6	<i>Reliable</i>

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian realibilitas untuk instrument yang ada dalam kuesioner mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* (α) yang lebih besar dari 0,6 dengan demikian item-item pernyataan dalam kuesioner mengenai pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan *reliable* atau andal. Dengan begitu, data tersebut bisa di gunakan untuk pengujian pada tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran data yang terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan menggunakan SPSS dengan mengguakan analisis statistik Kolmogorov Smirnov atau juga lebih dikenal dengan uji K-S. Apabila setelah diuji normalitas dan hasil nilai signifikansi Asymp.Sig (2tailed) lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini adalah data yang terdistribusi normal. Hasil dari pengujian normalitas yang telah dilakukan terhadap Variabel kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	98	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.19209666
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.103
	<i>Positive</i>	.103
	<i>Negative</i>	-.100
<i>Test Statistic</i>	.103	

Asymp. Sig. (2-tailed)	.013 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.	.245 ^d
99% Confidence Interval Lower Bound	.234
Upper Bound	.256

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai dari *Monte Carlo Sig (2-tailed)* dari penelitian ini sebesar 0,245. Nilai Monte Carlo Sig yang sebesar 0,245, mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka kita bisa mengatakan bahwa variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang mempunyai sebaran terdistribusi normal sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan pada tahap yang berikutnya.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen yang terdapat pada suatu penelitian. Terjadinya multikolinieritas dalam persamaan regresi dalam sebuah penelitian dapat mengakibatkan data yang digunakan menjadi bias. Untuk menentukan apakah terjadi multikolinieritas atau tidak didalam suatu penelitian kita bisa melihat dari *tolerance value* dan *inflation factor (VIF)*. Jika di dalam sebuah penelitian memiliki nilai *tolerance* > dari 0,10 dan memiliki nilai VIF < dari 10, maka bisa kita katakan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	Niai VIF	Keterangan
Pengawasan keuangan	0,581	1,721	Tidak terjadi multikolinieritas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,620	1,612	Tidak terjadi multikolinieritas
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,687	1,456	Tidak terjadi multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa variabel pengawasan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan juga mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut tidak ada unsur terjadinya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Variabel penelitian dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolute residual lebih dari 5% atau 0,05.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	A	Keterangan
Pengawasan keuangan	0,745	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,875	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,887	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas

Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *software* pengelolah data yaitu *SPSS* versi 25. Hasil dari uji regresi linier berganda mengenai pengawasan keuangan daerah (X1), akuntabilitas pengelolaan keuangan (X2), transparansi pengelolaan keuangan (X3) terhadap kinerja pemerintah daerah adalah

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Hipotesis	Koefisien Regresi	Nilai t	Probabilitas (sig)	Keterangan
Konstanta		10,987	6,068	0,000	
Pengawasan keuangan daerah	H1	0,214	3,360	0,001	Signifikan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan	H2	0,092	1,418	0,159	Tidak signifikan
Transparansi pengelolaan keuangan	H3	0,032	0,509	0,612	Tidak signifikan
<i>F</i>		12,061		0,000	
<i>R Square</i>		0,278			
<i>Adjusted R Square</i>		0,255			

Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,987	1,810		6,068	0,000
Pengawasan Keuangan	0,214	0,064	0,386	3,360	0,001
Akuntabilitas	0,092	0,065	0,158	1,418	0,159
Transparansi	0,032	0,062	0,054	0,509	0,612

Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 di tolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis pertama (H1) terdukung.
2. Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,159 yang berarti lebih besar dari $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a di tolak, yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis kedua (H2) tidak terdukung.
3. Nilai signifikansi variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,612 yang berarti lebih besar dari $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a di tolak, yang artinya bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis ketiga (H3) tidak terdukung.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2016).

Hasil Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	0,278	0,255	1.211

Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,255, nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 25,5% dan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar regresi.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2011: "Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan H_0 di tolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya pengawasan keuangan daerah dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan

wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Adisasmita (2011:89): Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak. Bahwa akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan organisasi, individu, atau kelompok.

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,159 yang berarti lebih besar dari > 0.05 . Hal ini dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a di tolak, yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Para pegawai tidak akan terpengaruh dengan adanya akuntabilitas yang diberikan pemerintah daerah. Akuntabilitas akan berpengaruh kepada masyarakat secara langsung, pemangku kepentingan dalam hal akuntabilitas adalah masyarakat. Oleh karena itu akuntabilitas tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tujuan akuntabilitas adalah suatu tindakan untuk memberikan informasi, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Disini bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan semata namun diharapkan dengan kesalahan tersebut dapat memperbaiki dan harus segera dikoreksi. Dengan begitu diharapkan pelaksanaan suatu kegiatan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu besarnya kesadaran perangkat daerah, begitu pentingnya perbaikan dan evaluasi, oleh karena itu akuntabilitas sudah melekat dan harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Sehingga hal seperti itu tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Mereka akan tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan, yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi pemerintah daerah, yang harus bekerja secara transparan dan akuntabel.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Tanjung (2011) transparansi adalah Bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi adalah prinsip yang menjamin yang mendasar dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.

Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 0,612 yang berarti lebih besar dari > 0.05 . Hal ini dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini ternyata menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ada tidaknya transparansi pengelolaan keuangan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah. Karena transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang harus ada sebagai sektor publik, harus mampu mengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Purnama Fifit (2016) yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,159 yang berarti $> 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah tidak terdukung. Penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Fifit (2016) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,612 yang berarti $> 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah tidak terdukung. Penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Hasil analisis data secara simultan diperoleh bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti < 0.05 . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terdukung.

Saran

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Pengawasan Keuangan daerah telah baik di lakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan seperti Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga hal ini berdampak pada Kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah agar Kinerja Pemerintah Daerah memiliki kualitas yang bagus.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Misal pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Responden yang dipilih dalam penelitian ini tidak terdistribus ke semua SKPD Kabupaten Magelang, ada beberapa SKPD yang tidak dijadikan sampel penelitian. Hal ini mungkin menimbulkan masalah tingkat keterwakilan responden. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya responden masih dapat di perluas lagi ke seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Magelang.
 - b. Beberapa kuesioner tidak diisi oleh responden karena beban kerja yang tinggi atau sedang berada diluar daerah karena perintah tugas dari atasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Binawati, Enita. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. WAHANA Volume 18, No. 1, Februari 2015.
- Cooper, Donald R, Pamela S Schindler. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta
- Halim, A. dan Iqbal M., 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [Http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-raih-predikat-wajar-tanpapengecualian.html](http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-raih-predikat-wajar-tanpapengecualian.html). Diakses pada 01 februari 2020 Jam 09:17.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo.2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

- Purnama, Fifit dan Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Riswanto, Natak. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Susliyanti, Eni Dwi. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*. WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017.
- Sugiarto. (2017b). *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Yeshkha, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.